

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan teknik *Accidental Sampling*. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan 100 kuesioner yang dibagikan kepada responden di KPP Semarang Selatan, selanjutnya dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis.

4.2. Karakteristik Data Responden

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 9.542 wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Semarang Selatan, yang digunakan sebagai responden. Metode pengambilan data pada penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner dan melakukan uji dengan 100 responden yang ditentukan dari rumus *slovin*. Data dihimpun melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk fisik (kertas) kepada wajib pajak yang dilakukan pada tanggal 26 November 2024 sampai dengan 29 November 2024. Data yang dikumpulkan mencakup karakteristik responden, seperti usia responden, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan terakhir.

Dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan, sebanyak 105 kuesioner kepada responden, terdapat 5 kuesioner tidak terisi secara lengkap, baik karena data diri yang tidak lengkap maupun jawaban yang tidak sepenuhnya diberikan. Sejumlah 100 kuesioner sisanya dapat dilakukan uji analisis selanjutnya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan alat uji statistik IBM SPSS 26. Rincian jumlah responden yang mengisi kuesioner disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Klasifikasi Data Responden

Keterangan	Jumlah
Kuesioner disebar	105
Kuesioner yang tidak lengkap	5
Kuesioner yang digunakan	100
Jumlah	105

4.2.1. Usia Responden

Usia responden dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan berpengalaman atau tidaknya responden tersebut. Sejumlah 100 responden diklasifikasikan menurut usia yang dibagi menjadi lima kelompok usia yang dapat ditinjau pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Klasifikasi berdasarkan Usia Responden

Usia	Jumlah	Presentase
20 – 30 Tahun	38	38 %
31 – 40 Tahun	31	31 %
41 – 50 Tahun	19	19 %
51 – 60 Tahun	10	10 %
61 – 70 Tahun	2	2 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan uji data usia responden pada tabel 4.2 adalah umur 20 – 30 tahun berjumlah 38 orang atau (38%), responden dengan umur 31 – 40 tahun berjumlah 31 orang atau (31%), responden dengan usia 41 – 50 tahun berjumlah 19 orang atau (19%), responden dengan usia 51 – 60 tahun berjumlah 10 orang atau (10%), responden dengan usia 61 – 70 tahun berjumlah 2 orang atau (2%) sehingga, dapat ditarik kesimpulan sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah berusia 20 – 30 tahun.

4.2.2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu responden laki – laki dan perempuan. Berdasarkan jumlah 100 responden yang terkumpul, berikut ini tabel yang menjelaskan tentang pembagian responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki – Laki	60	60 %
Perempuan	40	40 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan uji data jenis kelamin responden pada tabel 4.3 dengan jenis kelamin laki – laki sebanyak 60 orang atau (60%), sedangkan jenis kelamin responden Perempuan sebanyak 40 orang atau (40%) sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini adalah laki – laki.

4.2.3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan responden pada penelitian ini dikelompokkan menjadi lima yaitu SD, SMP, SMA, Diploma/S1 dan Pascasarjana. Berdasarkan jumlah 100 responden yang terkumpul, berikut ini tabel yang menjelaskan mengenai pembagian responden berdasarkan pendidikan terakhir:

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	1	1 %
SMP	0	0 %
SMA	21	21 %
Diploma / S1	70	70 %
Pascasarjana	8	8 %

Pendidikan	Jumlah	Presentase
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas responden yang memiliki pendidikan Diploma/S1 sebanyak 70 orang atau persentase sebesar 70%, sedangkan pendidikan SMA sebanyak 21 orang atau persentase sebesar 21%, kemudian untuk pendidikan pascasarjana sebanyak 8 orang atau persentase 8% dan untuk pendidikan SMP sebanyak 0 orang atau persentase sebesar 0% sedangkan, untuk SD sebanyak 1 orang atau persentase sebesar 1 %.

4.2.4. Pekerjaan Responden

Deskripsi pekerjaan responden pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bagian yaitu, PNS, Karyawan Swasta, BUMN, Polri/TNI dan lainnya. Berdasarkan jumlah 100 responden yang terkumpul, berikut ini tabel yang menjelaskan mengenai pembagian responden berdasarkan pekerjaan:

Tabel 4.5 Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah	Presentase
PNS	19	19 %
Karyawan Swasta	50	50 %
BUMN	2	2 %
Polri dan TNI	7	7 %
Lainnya	22	22 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan uji data pekerjaan responden pada tabel 4.5 adalah PNS sebanyak 19 orang (19%), Karyawan Swasta sebanyak 50 orang (50%), BUMN sebanyak 2 orang (2%), Polri dan TNI sebanyak 7 orang (7%) dan pekerjaan lainnya sebanyak 22 orang (22%) sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebagian pekerjaan

responden pada penelitian ini adalah pekerja swasta dengan jumlah 50 orang atau (50%).

4.3. Hasil Analisis Data

Setelah data diolah dan dianalisis menggunakan uji statistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS Versi 26, hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan variabel – variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.3.1. Statistik Deskriptif

Pada kuesioner penelitian ini, terdapat sejumlah pernyataan dalam bentuk skala Likert yang berkaitan dengan variabel X, yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak. Sementara itu, variabel Y dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Selatan, diukur menggunakan skala Guttman.

Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistic					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi	100	27	35	32.73	2.039
Pengetahuan Perpajakan	100	10	15	13.03	1.298
Sanksi Pajak	100	10	15	12.96	1.317
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	16	22	21.04	1.428
Valid (listwise)	100				

Sumber data: Olah data SPSS V.26, 2025

Berdasarkan tabel 4.6 statistik deskriptif diatas diketahui bahwa jumlah pengamatan (N) dari penelitian ini adalah sebanyak 100 data. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel dependen berupa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai rata – rata sejumlah 21.04, dengan skor tertinggi sebesar 22, yang diperoleh dari jawaban responden pada pertanyaan dengan skoring 2 untuk “iya” dan 1 untuk “tidak”. Nilai standar deviasi sebesar 1.428, temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Selatan tergolong baik, karena nilai standar deviasi menunjukkan tingkat penyimpangan yang relatif kecil dari nilai rata - rata.
2. Rata – rata untuk variabel bebas (independen) yaitu:
 - a. Pemanfaatan Teknologi Informasi menunjukkan nilai rata – rata sebesar 32.73 dengan skor tertinggi mencapai 35 yang diperoleh dari responden yang memberikan jawaban “sangat setuju” (skor 5), dan nilai terendah sebesar 27 dari jawaban “sangat tidak setuju” (skor 1) dan “tidak setuju” (skor 2). Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 2.039, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tergolong baik karena penyimpangannya relatif kecil dibandingkan dengan nilai rata – rata.
 - b. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai rata – rata sebesar 13.03, dengan skor tertinggi sebesar 15 yang diperoleh dari responden yang menjawab “sangat setuju” (skor 5), serta skor terendah sebesar 10 dari jawaban “sangat tidak setuju” (skor 1) dan “tidak setuju” (skor 2). Nilai standar deviasi sebesar 1.298 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan tergolong baik, karena penyimpangan datanya relatif rendah terhadap nilai rata – rata.
 - c. Variabel Sanksi Pajak menunjukkan rata – rata nilai sebesar 12.96 dengan skor tertinggi 15 yang berasal dari jawaban “sangat setuju” (skor 5), serta skor terendah 10 yang berasal dari jawaban “sangat tidak setuju” (skor 1) dan “tidak setuju” (skor 2). Dengan standar deviasi sebesar 1.317

bahwa sanksi pajak berada dalam kategori baik, karena penyimpangan datanya lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata – ratanya.

4.4. Hasil Uji Kualitas Data

4.4.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai apakah data dari kuesioner yang disusun telah memenuhi kriteria valid atau tidak. Pada uji ini terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menentukannya. Pertama, dengan melihat nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) pada total skor, jika nilai tersebut kurang dari 0.05, maka data dianggap valid. Kedua, berdasarkan nilai *Pearson Correlation*, di mana nilai *r* hitung harus lebih besar dari *r* tabel (Ghozali., 2021). Dengan tingkat signifikansi 0.05 dan derajat kebebasan (df) sebesar $n-2$, yaitu $100-2 = 98$, maka diperoleh nilai *r* tabel sebesar 0,196. Berikut ini disajikan hasil uji validitas terhadap data variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)

Variabel Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0.468	0.196	VALID
X1.2	0.324	0.196	VALID
X1.3	0.469	0.196	VALID
X1.4	0.573	0.196	VALID
X1.5	0.618	0.196	VALID
X1.6	0.715	0.196	VALID
X1.7	0.610	0.196	VALID

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data tabel 4.7, maka dapat dilihat bahwa nilai *r* hitung > dari *r* tabel dan seluruh komponen pertanyaan untuk variabel pembebasan pemanfaatan teknologi informasi memiliki keterangan valid.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2)

Variabel Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X2.1	0.795	0.196	VALID
X2.2	0.731	0.196	VALID
X2.3	0.738	0.196	VALID

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 4.8, maka dapat dilihat bahwa nilai r hitung $>$ dari r tabel dan seluruh komponen pertanyaan untuk variabel pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki keterangan valid.

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X3)

Variabel Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X3.1	0.731	0.196	VALID
X3.2	0.747	0.196	VALID
X3.3	0.770	0.196	VALID

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.9, maka dapat dilihat bahwa nilai r hitung $>$ dari tabel r dan seluruh komponen pertanyaan untuk variabel sanksi pajak memiliki keterangan valid.

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1.1	0.427	0.196	VALID
Y1.2	0.452	0.196	VALID
Y1.3	0.378	0.196	VALID
Y1.4	0.619	0.196	VALID
Y1.5	0.279	0.196	VALID

Variabel Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1.6	0.274	0.196	VALID
Y1.7	0.673	0.196	VALID
Y1.8	0.339	0.196	VALID
Y1.9	0.481	0.196	VALID
Y1.10	0.429	0.196	VALID
Y1.11	0.660	0.196	VALID

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat dilihat bahwa nilai r hitung $>$ dari r tabel dan seluruh komponen pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki keterangan valid.

4.4.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi indikator dalam kuesioner yang mewakili variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel apabila jawaban yang diberikan oleh individu terhadap pertanyaan tetap konsisten atau stabil seiring waktu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi keseluruhan (*alpha cronbach*) dengan nilai r tabel. Jika nilai α cronbach $>$ r tabel maka komponen pertanyaan pada variabel dinyatakan reliabel. Ghazali, (2018) menyatakan bahwa kuesioner dengan nilai reliabilitas *cronbach alpha* 0,60 – 0,70 dapat diterima atau reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas pada variabel pembebasan pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>No Of Item</i>	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	.626	11	Reliabel
Pemanfaatan teknologi informasi	.611	7	Reliabel
Pengetahuan perpajakan	.623	3	Reliabel
Sanksi Pajak	.607	3	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 4.11, bahwa hasil pengujian reliabilitas data menunjukkan pada nilai *cronbach's alpha* lebih besar $> 0,60$ dinyatakan reliabel (Ghozali., 2018). Hasil ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen yang valid untuk analisis lebih lanjut.

4.5. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji dan memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Model ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan nilai variabel independen (X_1, X_2, X_3) dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan nilai variabel dependen (Y). Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, model regresi linear berganda harus memenuhi persyaratan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, data dalam penelitian ini terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Pada uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan multikolinearitas antar variabel independen, ditunjukkan oleh nilai *tolerance* yang lebih dari 0,1 dan nilai VIF < 10 . Hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan

bahwa titik – titik pada grafik menyebar secara acak di atas dan dibawah garis 0 dan sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi linear berganda dalam penelitian ini telah memenuhi syarat kelayakan, dan hasil analisis selengkapnya disajikan pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Berganda

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(constant)	8.154	1.777		4.584	.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.075	.065	.120	1.148	.254
	Pengetahuan Perpajakan	.373	.086	.458	4.333	.000
	Sanksi Pajak	.370	.073	.410	5.087	.000

Sumber: Olah data SPSS V.26, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, sehingga model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,154 + 0,075PT + 0,373PP + 0,370SP$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PT = Pemanfaatan Teknologi Informasi

PP = Pengetahuan Perpajakan

SP = Sanksi Pajak

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, dapat diambil suatu analisis bahwa:

1. Hasil koefisien regresi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,075. Besaran nilai tersebut menyatakan pengaruh positif variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila variabel pemanfaatan teknologi informasi mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,075.
2. Hasil koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,373. Besaran nilai tersebut menyatakan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila variabel pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,373.
3. Hasil koefisien regresi pada variabel sanksi pajak sebesar 0,370. Besaran nilai tersebut menyatakan pengaruh positif variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila variabel sanksi pajak mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya bernilai konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,370.

4.5.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual atau gangguan dalam model regresi mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2021). Penelitian ini menggunakan metode statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, dengan tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. Apabila nilai signifikan yang diperoleh > 0.05 maka, data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikan < 0.05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi secara normal (Ghozali., 2021). Selain itu, normalitas data juga dapat diketahui melalui grafik *Normal P – P Plot Of Regression Standardized*. Jika titik – titik data tersebar disekitar garis diagonal

dan mengikuti pola garis tersebut, maka residual dianggap berdistribusi normal. Apabila penyebaran titik tidak mengikuti garis diagonal, maka distribusi residual dinyatakan tidak normal. Hasil dari uji normalitas dan grafik *P-P Plot of regression standardized* disajikan pada tabel 4.13 dan gambar 4.1 berikut.

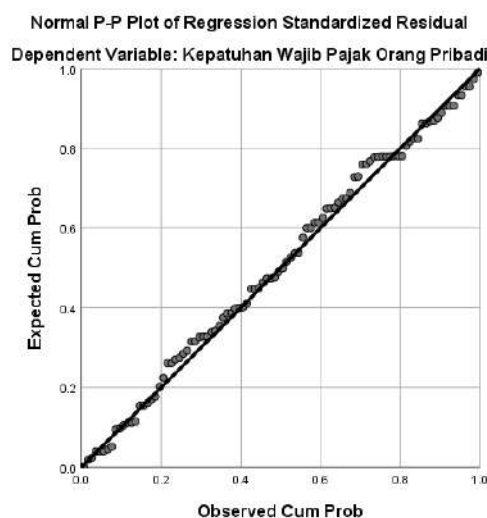
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation	1.14184231
	Absolute	.062
	Positive	.032
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2 – tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber data: Olah data SPSS V.26, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai asymp sig (2- tailed) sebesar $0,200 > 0,05$, yang berarti seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil tersebut juga didukung oleh *grafik P – P Plot of regression standardized* yang ditampilkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1 Hasil Grafik *P-P Plot of regression standardized*



Sumber: Olah data SPSS V.26, 2025

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa persebaran titik – titik di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis tersebut dapat dinyatakan nilai residual dianggap telah normal.

4.5.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui dalam model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang ideal tidak menunjukkan adanya hubungan antar variabel bebas. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel tersebut tidak bersifat *orthogonal*. Indikator yang umum untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* yang melebihi 0,1 dan VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2021). Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada tabel 4.14, berikut ini.

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	TOL	CUT OFF	VIF	CUT OFF	Keterangan
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.567	> 0,1	1.765	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Pengetahuan Perpajakan	.553	> 0,1	1.809	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Sanksi Pajak	.954	> 0,1	1.049	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Olah data SPSS V.26, 2025

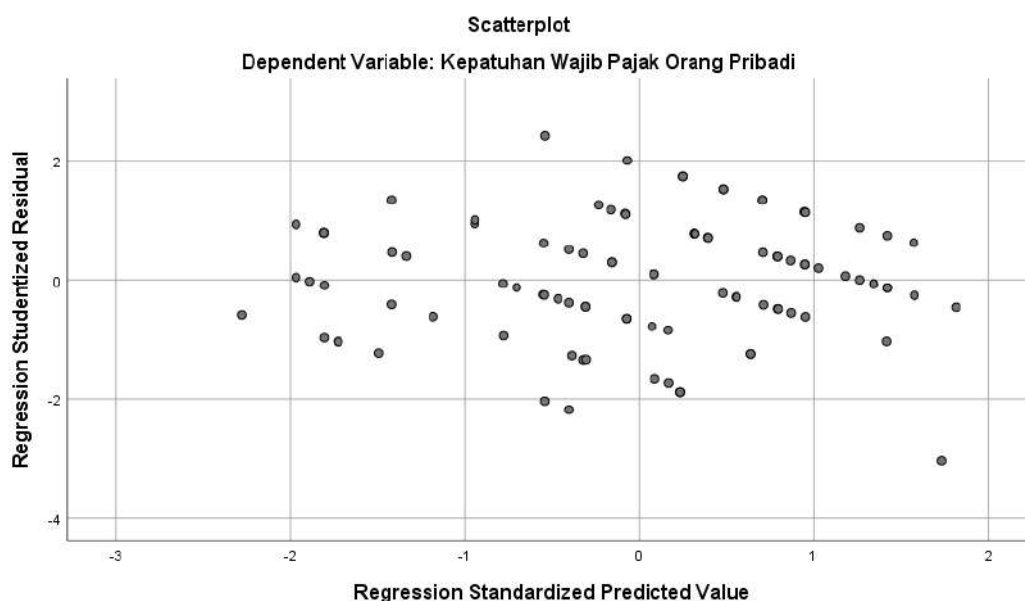
Berdasarkan tabel 4.14, dapat diketahui nilai *tolerance* pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah 0,567 variabel Pengetahuan Perpajakan adalah 0,553; variabel Sanksi Pajak adalah 0,954 sehingga, nilai *tolerance* dari masing – masing variabel lebih besar dari 0,1. Nilai VIF dari Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah 1,765, Pengetahuan perpajakan adalah 1,809, Sanksi Pajak adalah 1,049 sehingga nilai VIF dinyatakan kurang dari 10. Maka dapat

ditarik kesimpulan, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini, karena nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap asumsi dalam model regresi klasik adalah adanya gejala heteroskedastisitas, yang berarti varians dari residual tidak bersifat konstan. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, digunakan metode analisis melalui grafik *scatterplots*. Apabila titik – titik pada grafik tersebar secara acak dan merata di atas serta di bawah garis 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian tersebut ditampilkan pada gambar 4.2 dibawah ini.

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot



Sumber: Olah data SPSS V.26, 2025

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas pada gambar 4.2, pada grafik scatterplot terlihat titik – titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y dan tidak membentuk kerucut atau kipas pada model tersebut (Ghozali., 2021). Hal ini juga didukung oleh hasil uji spearman's rho yang

menunjukkan nilai sig. (2-tailed) > 0.05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.15. Uji Spearman's rho

<i>Correlations</i>						
			Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	<i>Unstandardized Residual</i>
Spearman's rho	Pemanfaatan Teknologi Informasi	<i>Correlation Coefficient</i>	1.000	.623**	.039	-.024
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.	.000	.698	.809
		N	100	100	100	100
	Pengetahuan Perpajakan	<i>Correlation Coefficient</i>	.623**	1.000	-.152	-.057
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.	.132	.573
		N	100	100	100	100
	Sanksi Pajak	<i>Correlation Coefficient</i>	.039	-.152	1.000	.084
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.698	.132	.	.408
		N	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	<i>Correlation Coefficient</i>	-.024	-.057	.084	1.000
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.809	.573	.408	.
		N	100	100	100	100

****.** *Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

Sumber: Olah data SPSS V.26, 2025

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.5.4. Uji f

Uji kelayakan model bertujuan untuk menilai apakah model regresi yang digunakan memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan statistik F yang terdapat dalam tabel ANOVA. Apabila nilai probabilitas (signifikansi) kurang dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$), maka model dianggap layak dan dapat digunakan dalam penelitian (Ghozali., 2021). Sebaliknya, jika nilai probabilitas melebihi 0,05 ($\text{sig} > 0,05$), maka model dinyatakan tidak layak untuk digunakan.

Tabel 4.16 Hasil Uji F

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	88.313	3	29.438	21.894	.000 ^b
	<i>Residual</i>	129.077	96	1.345		
	Total	217.390	99			

a. Dependent Variabel Y: Kepatuhan Pajak

Sumber data: Olah data SPSS V.26, 2025

Berdasarkan tabel 4.15, uji F diatas dapat menghasilkan nilai F hitung sebesar $21.894 > F \text{ tabel sebesar } 2.70$ dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0,05$, Hasil dari pengujian tersebut mengatakan bahwasannya nilai signifikansi lebih kecil dari 0.005 sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.5.5. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh masing – masing variabel independen secara individu dalam menjelaskan variabel dependen, dengan tingkat signifikan 5 %. Jika nilai signifikan $t < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

Sebaliknya jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut (Ghozali., 2021). Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.16 dibawah ini.

Tabel 4.17 Hasil Uji t

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1	(Constant)	8.145	1.777		4.584	.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.075	.065	.120	1.148	.254
	Pengetahuan Perpajakan	.373	.086	.458	4.333	.000
	Sanksi Pajak	.370	.073	.410	5.087	.000

Sumber: Olah data SPSS V.26, 2025.

Berdasarkan hasil uji hipotesis t pada tabel 4.16 disimpulkan bahwa:

1. Nilai signifikan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar $0,254 > 0,05$. Hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Nilai signifikan pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk variabel sanksi pajak, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.5.6. Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu memaparkan variasi dari variabel dependen. Apabila nilai adjusted R Square mendekati angka 1, hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai adjusted R square mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan fluktuasi variabel dependen tergolong lemah (Ghozali., 2021). Hasil pengujian koefisien determinasi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini.

Tabel 4.18 Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 ^a	.406	.388	1.15955

Predictors: (*Constant*), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber data: Olah data SPSS V.26, 2025

Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang ditampilkan pada tabel 4.17, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,388 atau 38,8 %. Artinya, variabel independen Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sebesar 38,8 %. Sementara itu, sisanya sebesar 61,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Pada penelitian sosial, nilai R^2 yang kecil tidak menjadi masalah karena fenomena sosial sangat kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhi di luar model (Ghozali, 2018).

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian data yang telah dilaksanakan menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien regresi senilai 0,075 kemudian nilai signifikansi pada uji t $0,254 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam Teori *Technology Acceptance Model* (TAM), penerimaan dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Namun dalam praktiknya, penerapan sistem digital seperti *e-filing* belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, salah satunya adalah rendah pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital. Di wilayah KPP Pratama Semarang Selatan, masih terdapat wajib pajak baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem layanan pajak digital secara optimal.

Ketidaktahuan wajib pajak mengenai cara penggunaan sistem tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan rasa takut dalam menjalankan proses pelaporan atau pembayaran pajak secara daring. Rasa tidak percaya diri ini dapat menyebabkan penundaan kewajiban perpajakan atau bahkan ketidakpatuhan dalam menyampaikan laporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Ketidaktahuan terhadap sistem layanan pajak digital juga turut berdampak pada rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap efektivitas dan keandalan sistem yang seharusnya mempermudah proses administrasi pajak. Ketika sistem dianggap

terlalu kompleks atau rumit untuk dipahami, sebagian wajib pajak menjadi enggan untuk menggunakannya.

Kurangnya pendampingan secara langsung dari pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membimbing penggunaan sistem layanan pajak digital juga dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Kurangnya pendampingan yang memadai dapat menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki dukungan saat menghadapi kendala teknis atau administratif dalam menggunakan sistem layanan pajak digital. Teknologi informasi yang seharusnya menjadi alat bantu dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak, justru dapat menjadi beban tambahan apabila tidak diiringi dengan edukasi yang memadai, pendampingan yang berkelanjutan, dan penyederhanaan sistem.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum mampu secara sepenuhnya untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama jika tidak disertai dengan upaya peningkatan literasi digital perpajakan dan keterlibatan aktif dari pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan bimbingan. Apabila sistem dirancang lebih sederhana, mudah dipahami dan didukung dengan pendampingan yang memadai, maka wajib pajak akan merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisah & Susanti, (2021), Marilyn et al., (2022) dan Lubua, (2019) yang menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Kamila et al., (2021) yang menyatakan bahwasannya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian data yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial. Hal dapat dilihat melalui nilai koefisien regresi 0,373 dan nilai signifikansi pada uji t $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) berkaitan dengan penerimaan teknologi yang dipengaruhi oleh *perceived usefulness* (kemanfaatan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan memiliki peran dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena individu yang memiliki pemahaman lebih baik tentang sistem perpajakan akan lebih cenderung menilai bahwa pajak itu bermanfaat (*perceived usefulness*) dan mudah untuk dipahami serta dijalankan (*perceived ease of use*). Hal ini sesuai dengan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dalam teori TAM dimana wajib pajak percaya bahwa sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja.

Wajib pajak yang memahami kewajiban serta prosedur pembayaran dan pelaporan pajak cenderung lebih menerima sistem perpajakan dan lebih patuh, sehingga mengurangi rasa takut atau enggan dalam membayar/melapor. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan perpajakan dapat menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisah & Susanti, (2021), Kamila et al., (2021), Nafingah et al., (2024) dan Assegaf & Andesto (2023) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Marilyn et al., (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.6.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian data yang dilaksanakan menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat ditinjau melalui nilai koefisien regresi senilai 0,370 kemudian nilai signifikansi pada uji t $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Pada Teori *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi terhadap kemudahan dan kegunaan suatu sistem mempengaruhi sikap serta perilaku pengguna dalam menerima dan memanfaatkan sistem tersebut. Dalam hal ini, sanksi perpajakan yang dirancang dengan proporsional turut berperan dalam menciptakan persepsi positif terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Sanksi yang tidak memberatkan, namun tetap memberikan efek jera, dapat meningkatkan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan kegunaan (*perceived usefulness*) dari sistem perpajakan digital. Hal ini karena wajib pajak merasa bahwa sistem tidak menakutkan atau menyulitkan, melainkan membantu mereka memahami batasan dan konsekuensi dari setiap tindakan.

Pada KPP Pratama Semarang Selatan, penerapan sanksi yang lebih terstruktur dan disertai sosialisasi yang memadai telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui bahwa pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif menjadi lebih sadar akan pentingnya ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan. Sanksi pajak dalam hal ini, bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai dengan prinsip dalam TAM, kejelasan dan kemudahan dalam memahami sanksi dapat meningkatkan penerimaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan secara adil, jelas dan terukur mampu memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan mudah dipahami dan bermanfaat

dalam membantu mereka memenuhi kewajiban, maka tingkat kepatuhan akan lebih meningkat secara signifikan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisah & Susanti, (2021), Irmawati & Hidayatulloh (2019), Pujilestari et. al., (2021), dan Rioni & Saraswati (2018) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil, (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.